

Kebijakan luar negeri amerika terhadap indonesia 1998 - 2000 : friksi eksekutif dengan legislatif mengenai bantuan ekonomi melalui imf

Chodidah Budi Rahardjo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=96895&lokasi=lokal>

Abstrak

esis ini membahas kebijakan luar negeri Amerika dibawah kepemimpinan Presiden Clinton terhadap Indonesia melalui peranannya di IMF tahun 1998-2000, pasca pemerintahan Soeharto. Mempertimbangkan kepentingan politik luar negeri Amerika di kawasan Asia Tenggara dan melihat kesempatan bagi Amerika untuk memperoleh akses dalam mengontrol keputusan-keputusan politik yang penting di kawasan ini termasuk Indonesia, maka kedudukan seorang presiden Amerika menjadi penting dan sangat menentukan di dalam cara-cara pengambilan keputusan. Walaupun Kebijakan luar negeri Amerika lebih banyak dijalankan oleh presidennya sendiri, namun ia tidak lepas dari kontrol Kongres, khususnya dari Senate Foreign Relations. Tanpa dukungan Senat, seorang presiden Amerika tidak dapat menjalankan kebijakan politik luar negerinya dengan baik

Hans J. Morgenthau menyatakan bahwa isi dari kepentingan nasional Amerika ditentukan oleh tradisi-tradisi politik dalam konteks kebudayaan secara menyeluruh dimana Amerika merumuskan kebijakan luar negerinya. Kebijakan bantuan ekonomi Amerika kepada Indonesia periode 1998»2000, dibawah pemerintahan Presiden Clinton, dipola untuk melestarikan nilai-nilai Amerika (american values) yaitu memperluas demokrasi dan sistem perdagangan bebas serta mempertahankan kepentingan keamanan Amerika di Asia Tenggara khususnya Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan luar negeri tersebut, Presiden Clinton cenderung untuk memanfaatkan institusi moneter internasional yaitu IMF. Pemanfaatan bantuan luar negeri melalui IMF selain memperkuat komitmen Amerika pada jalur diplomasi idealis yang telah dirintis oleh Presiden Wilson juga menghindari terjadinya friksi yang mungkin timbul antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam pembangunan ekonominya. Dalam arti lain, dengan menerapkan muscular multilateralism, Presiden Clinton melandaskan politik luar negeri yang menjaga jarak atau equidistant policy.

Policy of equidistance ini menimbulkan friksi dengan lembaga legislatif dan pendapat umum. Baik legislatif maupun pendapat umum melihat diplomasi muscular multilateralism tersebut justru lebih memberatkan dan membebani rakyat Indonesia dari pada membantunya. Lebih dari itu adalah bahwa muscular multilateralism akan meminimalkan peran negara Amerika Serikat sebagai aktor utama yang bermain di Indonesia. Dengan demikian prestige dan pengaruh Amerika tidak menonjol. Akibatnya Amerika bukan lagi berperan sebagai super power yang harus memimpin kerja sama regional di Asia Tenggara.

Penerapan policy ini tentu banyak menguntungkan bagi Amerika Serikat baik

secara economic cost maupun political cost. Oleh karena itulah Pemerintah Presiden Clinton secara sungguh-sungguh memprojuangkan agar Kongres memahami, mendukung, dan akhirnya menyetujui terlaksananya policy tersebut. Clinton berkeyakinan bahwa policy yang diterapkan akan banyak membenarkan keuntungan bagi kepentingan Amerika. Bisa dikatakan bahwa dengan meminjam tangan IMF, Amerika hanya mengeluarkan sedikit pengorbanan dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya."

Penulisan tesis ini menggunakan metoda deskriptif-kualitatif dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis (data sekunder), baik yang diperoleh dari berbagai macam literatur yang relevan dan memanfaatkan hasil-hasil dari suatu penelitian yang dituangkan dalam jurnal-jurnal ilmiah atau sumber-sumber lainnya.

Bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara sungguh-sungguh dan menyeluruh adalah merupakan kepentingan Amerika sebagai manifestasi dari "doctrine of enlargement" nya. Terwujudnya demokrasi di Indonesia akan berperan sebagai frontier politik Amerika sehingga peran "super power" Amerika seperti pada masa Perang Dingin tidak diperlukan lagi. Disamping itu, terwujudnya demokrasi akan memperluas ekonomi negeri ini yang berorientasi pada pasar (market-oriented economics). Kondisi tersebut memungkinkan terwujudnya kepentingan ekonomi Amerika yang selanjutnya mampu menghasilkan usaha-usaha yang bisa mendukung pada kemitraan yang global.